

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya persaingan bisnis saat ini memberikan pengaruh terhadap aktivitas perusahaan terutama dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi kepada para pihak yang mempunyai kepentingan dalam laporan keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja manajemen untuk pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan tersebut dikatakan baik apabila *reliable*, lengkap serta mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis dengan berusaha menyajikan laporan keuangan yang baik agar menarik investor dalam menanamkan modalnya karena laporan keuangan merupakan poin utama dalam pengambilan keputusan.

Menyadari pentingnya peran laporan keuangan bagi perusahaan, pihak manajemen berusaha menyajikan laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja yang baik bagi perusahaan. *Top management* merupakan pihak yang mengetahui informasi internal suatu perusahaan, yang bertanggungjawab terhadap tata kelola perusahaan dan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini dalam berbisnis perlu diterapkan etika yang benar agar terhindar dari terjadinya kecurangan. Tetapi berdasarkan fakta yang dapat dilihat saat ini yang bersumber dari media massa, terdapat beberapa perusahaan yang terkena sanksi akibat pelanggaran terindikasi dalam melakukan kecurangan diantaranya seperti ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85

ribu atau setara Rp 11,33 M. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar USD 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada PT Garuda Indonesia tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan (Okezone,2019). Selain itu juga ada perusahaan yang melakukan kecurangan terkait laporan keuangan yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Dari hasil dua kali Investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006. Pembukuan yang seharusnya terhitung rugi di modifikasi sedemikian rupa oleh Jiwasraya. Hal ini menunjukkan adanya persoalan tekanan likuiditas di Jiwasraya yang telah berlangsung lama (Okezone,2019).

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan terbaik atau dalam kata lain dapat menguntungkan perusahaan. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan yang memiliki kepentingan. Menurut Standar Audit (SA) 240, Kecurangan yaitu suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut Girau et al (2019), Kebutuhan untuk mengatasi masalah ini sangat penting karena kerugian yang diderita, mengancam kekayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang mempengaruhi stabilitas

masyarakat.

Penelitian tentang kecurangan laporan keuangan menarik untuk diteliti. Masalah penipuan perusahaan telah menerima perhatian kritis yang signifikan setelah skandal profil tinggi di *Enron, Tyco dan WorldCom* (Girau et al,2019). Di Indonesia tidak sedikit kasus-kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi, beberapa diantaranya adalah kasus PT. Waskita Karya (2009), PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2019) dan PT. Garuda Indonesia Tbk (2019) (Priswita dan Taqwa, 2019). Kasus tersebut memberikan bukti bahwa adanya kegagalan audit yang berdampak kerugian kepada pelaku bisnis. Tidak semua kasus salah saji terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak auditor, tetapi telah terbukti adanya faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Pengungkapan pertama kali kriteria materialitas pengendalian internal di Tiongkok cenderung mengungkapkan sikap manajemen terhadap penipuan yang ada melalui pilihan metrik materialitas manajemen (Wu dan Wang, 2018). Salah satu tipe tipikal dari perilaku ilegal perusahaan adalah penipuan keuangan perusahaan, yang didefinisikan sebagai pernyataan keliru yang disengaja dari informasi dalam laporan keuangan perusahaan. (Wu dan Wang, 2018). Di Amerika, *General Electric Company*, sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang bermarkas di New York didera isu manipulasi laporan keuangan (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diantaranya PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) melakukan salah catat dalam laporan keuangan kuartal I-2010 lalu (Okezone, 2010). Contoh lainnya adalah kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2001. Dalam

laporan tersebut, Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp 132 miliar, padahal sebenarnya hanya menjala untung sebesar Rp 99 miliar (tempo.co, 2003).

Kecurangan dalam pelaporan keuangan dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Claessens dan Yurtoglu, rata-rata perusahaan dari negara-negara berkembang masih memiliki tata kelola perusahaan yang lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan negara maju (Esqueda dan O'Connor, 2020). Tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Seringnya terjadi kecurangan finansial sampai batas tertentu mengindikasikan ketidakefektifan tata kelola direksi (Xu et al, 2017). Dengan demikian, mengingat bahwa eksekutif memainkan peran penting dalam penipuan keuangan perusahaan dan bahwa dewan direksi ditugasi untuk memantau keputusan mereka, sangat penting untuk memahami jenis dewan mana yang efektif dalam mencegah penipuan keuangan perusahaan. (Xu et al, 2017). Menurut Ntim dan Danbolt, baru-baru ini, pentingnya tata kelola perusahaan telah diperkuat karena kasus klasik penipuan perusahaan yang memicu perlunya mekanisme tata kelola perusahaan yang ketat (Arslan dan Alqatan, 2020).

Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh para pengguna laporan keuangan yang memiliki kepentingan. Menurut Priswa dan Taqwa (2019), *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Beasley (1996); Farber (2005); Persons (2006), Tata kelola perusahaan yang buruk akan meningkatkan kejadian penipuan dalam suatu organisasi. Menurut Xu et al

(2017), eksekutif mempunyai peran penting dalam penipuan keuangan perusahaan dan bahwa dewan direksi ditugasi untuk memantau keputusan mereka, sangat penting untuk memahami jenis dewan mana yang efektif dalam mencegah penipuan keuangan perusahaan.

Menurut Teori Agensi menunjukkan bahwa minat yang berbeda dari manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan kebutuhan untuk memiliki tata kelola perusahaan yang efektif untuk memantau dan mengendalikan kegiatan manajemen (Shleifer dan Vishny, 1997). Tata kelola perusahaan telah diidentifikasi sebagai alat dan mekanisme penting di pasar modal untuk memperkuat kepercayaan investor bahwa bisnisnya dikelola dengan baik dan terus makmur. Namun, meskipun banyak perbaikan pada tata kelola dan pembentukan undang-undang dan peraturan baru untuk memerangi penipuan perusahaan, jumlah kasus penipuan perusahaan terus meningkat (Girau et al, 2019). Menurut Salim, mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan (Priswita dan Taqwa, 2019).

Widodo dan Syafruddin (2017) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa keberadaan KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Ini artinya perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* dapat meminimalisir tindakan kecurangan pada suatu perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti dan Prastichia (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tipe auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sari dan Husada (2020) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap

kecurangan laporan keuangan.

Menurut Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Bapepam menghimbau komite audit mengadakan rapat secara berkala minimal satu kali dalam tiga bulan. Hal tersebut dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan perusahaan. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Siregar dan Surbakti (2019) yaitu rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah *fraud*. Sedangkan penelitian Yang et al (2017) menemukan bahwa komite audit tidak berperan dalam pengendalian kecurangan di China. Variabel lainnya yaitu, tingkat kepemilikan institusional dapat mengurangi kecurangan dikarenakan adanya pengawasan dari pihak eksternal, hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian Cheng et al (2019) yang menunjukkan bahwa pemegang institusional aktif dengan saham besar di perusahaan yang memiliki saham yang baik untuk memantau kegiatan manajer dengan hati-hati. Sedangkan penelitian Riandani dan Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Girau et al (2019), penelitian tersebut bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan kemungkinan kecurangan perusahaan di Malaysia. Hal ini mendorong penelitian ini agar dilakukan di Indonesia. Penelitian ini memutuskan untuk mengembangkan penelitian terdahulu dengan perbedaan variabel proksi tata kelola perusahaan. Variabel tersebut diantaranya yaitu keberadaan KAP *Big Four*, jumlah dewan komisaris, peran komite audit, serta tingkat kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Priswa dan Taqwa (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Husadha (2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan KAP *Big Four*,

jumlah dewan komisaris, peran komite audit, serta tingkat kepemilikan institusional terhadap kemungkinan kecurangan perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait penelitian tentang faktor penyebab terjadinya kecurangan pada suatu perusahaan.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan perusahaan adalah *Beneish M-Score Model*. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur tersebut untuk mengetahui apakah adanya manipulasi atas laporan keuangan suatu perusahaan. Beneish (1999) melakukan penelitian terhadap perbedaan kuantitatif antara perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan dan yang tidak memanipulasi laporan keuangan dengan menggunakan 8 rasio keuangan diantaranya DSRI, AQI, SGI, GMI, DEPI, SGAI, TATA, dan LVGI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 76% sampel yang memanipulasi laporan keuangan. Penelitian Beneish juga diperkuat oleh Wells (2001) yang juga melakukan penelitian terhadap kecurangan laporan keuangan yang dipublikasikan dengan judul *Irrational Ratios* (Journal of Accountancy, 2001) yang diterbitkan oleh AICPA.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Alasan memilih perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi karena peneliti ingin fokus terhadap objek tersebut, ditambah lagi dengan belum ditemukannya penelitian yang fokus meneliti sektor perdagangan, jasa, dan investasi dengan variabel corporate governance dan kecurangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Penggunaan *Beneish M-Score Model* untuk melihat Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kecurangan Perusahaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa kasus kecurangan perusahaan yaitu pada pelaporan keuangan perusahaan telah terjadi akhir akhir ini. Laporan keuangan yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga, dapat memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan kepada para pengguna laporan keuangan yang akan memberikan dampak kerugian kepada mereka.

Kecurangan tersebut dapat terjadi karena lemahnya tata kelola perusahaan Sistem kontrol audit oleh auditor eksternal dan pengawasan yang lemah telah dihubungkan dengan kecurangan perusahaan pada beberapa penelitian yang telah ada. Kegagalan auditor dalam memprediksi kasus kecurangan menimbulkan dampak yang luas bagi para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Menurut Al-ahdal et al (2020), Tata kelola perusahaan yang kompeten dan efisien sangat penting di negara-negara berkembang karena struktur tata kelola perusahaan yang lemah, diperlukan untuk memotivasi tata kelola perusahaan yang transparansi, keunggulan manajerial untuk mengatasi semua kecurangan yang membantu perusahaan untuk menarik investor asing dan memperbesar modalnya. Menurut Effendi (2009) tata kelola perusahaan yang baik dapat membentuk pola kerja manajemen yang transparan dan profesional. Sistem tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang bersih dan transparan.

Tata kelola perusahaan yang baik itu adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan etika usaha yang berlaku. Kriteria dari tata kelola perusahaan yang baik itu diantaranya ukuran dewan akan mempengaruhi peningkatan efektivitas dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, dewan direksi dan komposisi komisaris yang independen yang dapat memantau dan mengontrol keputusan dengan lebih baik, adanya rapat dewan, adanya keseimbangan wewenang *CEO* dengan chairman untuk menghindari keputusan

yang bias, *CEO* yang lebih tua dipercaya mengenali masalah moral dan penalaran moral yang baik dengan demikian dapat meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan, adanya kepemilikan manajerial, memberikan kompensasi *CEO* yang cukup serta tidak berlebihan dalam pemberian kompensasi tersebut, adanya kepemilikan institusional, keberadaan KAP *Big Four* yang dapat meningkatkan kualitas audit suatu perusahaan, pelaksanaan komite audit dan audit internal yang sesuai dengan standar yang diterima umum, dan seringnya diadakan rapat komite audit dapat meningkatkan fungsi dewan komisaris dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia yaitu penelitian Girau et al (2019), menggunakan variabel *corporate governance* sebagai variabel independen diantaranya Ukuran Dewan, Jumlah *CEO* Idependen dalam Dewan, Frekuensi rapat dewan, dualitas *CEO*, Usia *CEO*, Kepemilikan Manajerial, Kompensasi *CEO*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di Indonesia oleh Priswa dan Taqwa (2019), menggunakan variabel independen mekanisme dari *corporate governance* diantaranya Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Serta penelitian lain yang juga dilakukan di Indonesia oleh Sari dan Husadha (2020) yang menggunakan variabel independen pengungkapan *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komite audit audit internal, dan keberadaan KAP *Big Four*, Dari penelitian tersebut memberikan dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih variabel *corporate governance* diantaranya keberadaan KAP *Big Four*, jumlah dewan komisaris, peran komite audit dan tingkat kepemilikan institusional karena tertarik terhadap variabel tersebut dan ingin melihat pengaruh dari empat variabel tersebut terhadap kecurangan perusahaan, selain itu peneliti ingin fokus terhadap empat variabel tersebut agar terhindar dari terjadinya bias. Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan yaitu tingkat kepemilikan

manajerial, jumlah dewan komisaris, peran komite audit, dan tingkat kepemilikan konstitusional terhadap kecurangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keberadaan KAP *Big Four* mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan?
2. Apakah Jumlah Dewan Komisaris mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan?
3. Apakah Peran Komite Audit mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan?
4. Apakah Tingkat Kepemilikan Institusional mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan?
5. Apakah Keberadaan KAP *Big Four*, Jumlah Dewan Komisaris, Peran Komite Audit, dan Tingkat Kepemilikan Institusional mempengaruhi potensi kecurangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Keberadaan KAP *Big Four* terhadap potensi kecurangan perusahaan.
2. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap potensi kecurangan perusahaan.
3. Pengaruh Peran Komite Audit terhadap potensi kecurangan perusahaan.
4. Pengaruh Tingkat Kepemilikan Konstitusional terhadap potensi kecurangan perusahaan.
5. Pengaruh Keberadaan KAP *Big Four*, Jumlah Dewan Komisaris, Peran Komite Audit, dan Tingkat Kepemilikan Institusional terhadap potensi kecurangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi keperilakuan. Tujuannya agar mewujudkan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencegah tindakan kecurangan untuk menghindari penyimpangan dalam studi teori keagenan.

2. Aspek Praktis

Meningkatkan nilai tambah struktur organisasi pengendalian dalam sistem pengendalian manajemen serta membentuk sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dibahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

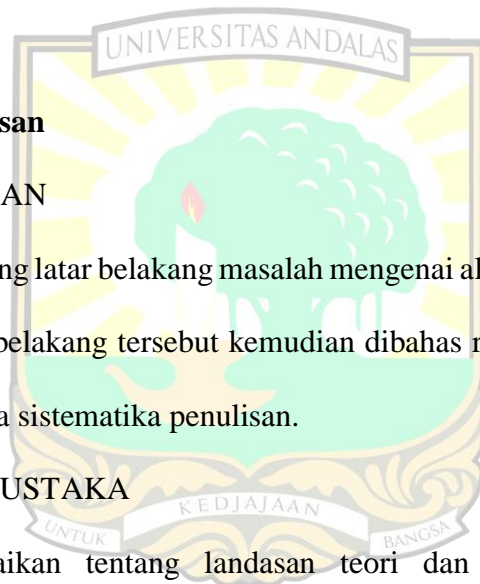
Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan kerangka pemikiran yang menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan mode pengumpulan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data dan pembahasan untuk masing-



masing variabel.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

